**KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS
PENERBITAN COVERNOTE YANG KLAUSULNYA TIDAK SESUAI
DENGAN FAKTA SEBENARNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
3801 K/PID.SUS/2022)**

Liana Tirta Anda Lusia
andalusia_cl@yahoo.co.id
Universitas Pancasila

Abstrak: Penerbitan covernote merupakan kebiasaan praktik hukum yang biasa dilakukan oleh notaris dalam perjanjian kredit perbankan. UUJN tidak mengatur penerbitan covernote, tetapi melalui interpretasi Pasal 1 Ayat (1) jo Pasal 13 Ayat (1) UUJN memberi ruang perundang-undangan lain dalam hal ini PJOK Nomor 11/POJK.03/2019 menjadi dasar kewenangan notaris menerbitkan covernote. Dalam penerbitan Covernote yang tidak sesuai dengan klausul yang sebenarnya, notaris GH dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan pidana. Dalam perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 terbukti bersalah telah merugikan keuangan negara sehingga notaris yang bersangkutan turut terseret dalam kasus tindak pidana korupsi selaku turut serta.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Covernote, Perjanjian Kredit.

***Abstract:** Issuing covernotes is a legal practice usually carried out by notaries in banking credit agreements. UUJN does not regulate the publication of covernotes, but through the interpretation of Article 1 Paragraph (1) in conjunction with Article 13 Paragraph (1) UUJN provides space for other legislation, in this case PJOK Number 11/POJK.03/2019 is the basis for a notary's authority to issue covernotes. If a Covernote is published that is not in accordance with the actual clauses, the GH notary may be held liable for civil and criminal liability. In case Number 3801 K/Pid.Sus/2022 he was proven guilty of causing harm to state finances so that the notary concerned was also involved in a criminal corruption case as a participant.*

***Keywords:** Notary's Responsibilities, Covernote, Credit Agreement.*

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menyatakan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme. Makna sebagai Negara hukum cukup bervariasi, namun pada intinya dapat dimaknai bahwa semua aspek fungsi negara, termasuk sikap dan perilaku atau kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga yang lainnya termasuk seluruh warga negara yang ada di dalamnya terikat dalam mekanisme peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu karakteristik sistem hukum di Indonesia yaitu menganut pembagian hukum publik dan hukum privat, yang merupakan salah satu ciri civil law system. Sebagai negara hukum, pemerintah memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik bagi seluruh warganya. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas pokok pemerintahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena produktivitas dari layanan publik dapat menjadikan barometer dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu dari sekian banyak bentuk pelayanan publik yaitu pembuatan akta melalui notaris.

Untuk memberikan layanan publik tersebut, pemerintah telah menugaskan pejabat umum yaitu Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris mewakili negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada publik sehubungan dengan urusan pokok yang sangat mendasar dalam pembuatan hukum yang dilakukan oleh semua subjek hukum di dalam bidang keperdataan. Notaris berperan penting dalam roda perekonomian nasional karena memiliki kewenangan untuk menyiapkan dan memformulasikan dokumen-dokumen penting berupa akta autentik, perjanjian, klausula maupun penetapan yang dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat atas kehendak dan maksud masing-masing pihak.

Dengan wewenangnya, notaris dapat membuat akta autentik terkait dengan perjanjian. Dalam konteks ini, perjanjian yang dimaksud adalah membuat akta perjanjian kredit perbankan. Notaris dalam kredit perbankan berperan penting terutama dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit dan perjanjian bisnis. Dalam perjanjian kredit perbankan terdapat dua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Keduanya saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kreditur bertanggung jawab untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur bertanggung jawab untuk membayar pokok dan bunga serta biaya lainnya dalam jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.

Dalam praktek perbankan, dalam setiap pengajuan kredit diperlukan adanya jaminan yang biasanya nilainya setara atau lebih dari jumlah pinjaman kredit. Fungsi dari jaminan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan keyakinan bagi pihak kreditor atau bank bahwa kredit yang dikucurkan akan dapat diterima kembali pada waktu yang telah disepakati. Apabila terjadi kemacetan di kemudian hari dalam pembayaran angsuran kredit, maka bank dapat menggunakan jaminan tersebut yang dijual melalui proses lelang dan selanjutnya hasil penjualan objek jaminan tersebut dipergunakan untuk menutupi sisa kredit yang belum terlunasi.

Sertipikat tanah merupakan salah satu jaminan yang sering digunakan dalam kredit perbankan. Namun, ada kalanya bentuk jaminan yang dibebankan hak tanggungan hanya berupa tanah saja dan belum memiliki kelengkapan surat-surat sehingga dalam pelaksanaan kredit bank, pihak bank bekerja sama dengan notaris untuk melakukan pengurusan kelengkapan proses administrasi sebagai prosedur baku dalam pencairan kredit. Dalam proses kredit ini, notaris sering dimintakan oleh pihak bank untuk membuat surat keterangan atau covernote yang isinya memuat informasi terkait dengan akta atau suatu dokumen yang masih dalam proses dan kesanggupan penyelesaian akta notaris untuk menyerahkan akta tersebut kepada kliennya. Perihal objek jaminan kredit, baik yang sudah bersertipikat maupun belum, pihak bank selalu minta dikeluarkan covernote dari notaris. Covernote merupakan surat keterangan dari notaris yang diberikan kepada bank sebagai kreditur untuk menjelaskan proses perjanjian kredit antara bank dan debitur. Covernote digunakan sebagai

pengganti bukti jaminan sementara hingga notaris menyelesaikan akta kepemilikan tanah yang sedang dalam proses.

Persoalan covernote memang cukup dilematis bagi notaris karena suatu tuntutan kebutuhan dalam setiap transaksi perbankan yang menuntut kepastian hukum dan beban tanggung jawab yang cukup besar bila dijalankan dengan tidak penuh kecermatan atau saksama. Jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya terkait dengan penerbitan covernote, maka notaris dapat turut terseret dalam persoalan tersebut sehingga berpotensi mendegradasikan integritas jabatan notaris yang diembannya, dan dapat pula merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan negara. Sementara jika melihat ketentuan UUJN, tidak ada satu pasalpun yang mengulik tentang kewenangan notaris dalam pembuatan covernote, akan tetapi dalam praktiknya notaris dapat menerbitkan covernote sehingga dapat dikatakan bahwa notaris menjalankan yang bukan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa covernote merupakan bentuk penemuan hukum oleh notaris terkait permasalahan yang timbul di masyarakat atas kebutuhan mendesak debitur dan kreditur.

Ketiadaan aturan tentang covernote tetapi praktiknya dapat dijalankan oleh notaris sehingga timbul persoalan hukum terkait apa yang menjadi dasar notaris dapat membuat covernote serta bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris jika dalam penerbitan covernote yang klausulnya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang kemudian menyeret notaris dalam persoalan hukum menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Hal ini didasari adanya peristiwa aktual notaris menjadi terpidana dalam kasus korupsi sebagai pelaku turut serta akibat penerbitan covernote yang dianggap merugikan keuangan negara dalam pengajuan kredit modal kerja (KMK) pada suatu bank milik pemerintah dalam perkara Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022.

Singkat kronologisnya bahwa Notaris GH merupakan notaris yang menjalin kerjasama dengan bank BRI yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau MoU yang sudah terjalin sejak tahun 2015. Dalam suatu peristiwa perjanjian kredit, pihak bank memerintahkan Notaris GH untuk menerbitkan perjanjian dan telah menerbitkan perjanjian kredit terhadap 42 (empat puluh dua) debitur dengan covernote pada BRI Cabang Depati Amir Pangkalpinang. Proses selanjutnya dilakukan peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik atas SPPPFAT (Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah), Hak Tanggungan 1 atas Sertifikat Hak Milik dan Covernote. Namun dalam kenyataannya Notaris GH telah membuat Surat Perjanjian Kredit antara Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir dengan para debitur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang debitur dengan salah satu klausulnya berisi para debitur ada mempunyai usaha dagang tetapi tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu para debitur tidak mempunyai usaha perdagangan, SIUP, TDP, Nota penjualan, mutasi rekening koran, surat agunan bagi debitur yang tidak memiliki ataupun agunannya kurang dari nilai kredit serta tidak membacakan isi Surat Perjanjian Kredit tersebut kepada para debitur serta menerbitkan Covernote yang ternyata sampai saat ini tidak bisa diterbitkan sertifikatnya dan tidak melakukan pemeriksaan SPPPFAT yang ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Milik yang sudah terbit untuk dijadikan sebagai agunan Kredit Modal Kerja (KMK) sehingga Surat Keterangan Covernote tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh Bank BRI untuk mencairkan uang kepada para debitur yang mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK). Implikasi dari perbuatan Notaris GH yang tidak benar tersebut, pihak bank tidak dapat menguasai objek agunan kredit para debitur dan mengakibatkan kerugian bank sekitar empat puluh tiga miliar rupiah.

METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dalam suatu disiplin ilmu merujuk pada serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang terintegrasi mengenai fenomena yang dipelajari. Tanpa penerapan metode ilmiah, sebuah disiplin ilmu tidak akan lebih dari sekadar kumpulan pengetahuan yang

terpisah tentang berbagai gejala, tanpa adanya pemahaman mengenai hubungan antar gejala tersebut. Dalam penyusunan kajian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan penelitian, melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif, karena untuk melihat hubungan yang koheren antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kesesuaian antara tindakan seseorang dengan peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan data melalui data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa buku, tulisan, jurnal dan lainnya yang sejalan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder meliputi regulasi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap dari keduanya meliputi kamus dan kamus hukum. Adapun teknik yang digunakan adalah studi dokumen atau library research, sementara untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan perundang-undangan. Selain itu, menggunakan teknik analisisnya induksi, yakni mengumpulkan hal-hal yang khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Notaris Berwenang Menerbitkan Covernote Sementara Hal tersebut Tidak Diatur Dalam UUJN

Eksistensi Notaris memiliki peran sangat penting dan strategis sebagai pejabat umum yang telah diberi kewenangan secara atribusi oleh negara melalui UUJN. Hubungan notaris dengan lembaga keuangan perbankan tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya saling menopang dalam memberikan pelayanan publik antara nasabah dengan pihak bank. Di sisi yang lain, aktivitas perbankan yang banyak melakukan transaksi dengan pihak nasabah, yang mana dalam transaksi tersebut seringkali dibuat dalam suatu perjanjian atau kontrak kredit.

Praktik Notaris dan bank dapat bekerja sama untuk menerbitkan akta notaris yang diperlukan dalam perjanjian kredit. Bentuk kerjasama ini dapat berupa notaris menjadi rekanan bank, di mana notaris akan mendapatkan pekerjaan dan klien dari pihak bank. Namun demikian, persoalan yang seringkali muncul ke publik dan menjadi perhatian banyak khalayak terutama rekan sesama notaris salah satunya adalah penerbitan covernote oleh notaris. Dipersoalkannya covernote dalam perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 karena dinilai telah merugikan keuangan negara sehingga notaris yang bersangkutan turut terseret dalam kasus tindak pidana korupsi selaku turut serta.

Peraturan yang menaungi notaris dalam hal ini UUJN telah memuat norma-norma yang mengatur mana yang menjadi kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan notaris yang tertuang dalam Pasal 15 UJUN merupakan kesatuan kewenangan yang wajib dijalankan oleh notaris. Dalam pasal tersebut maupun isi keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam UUJN tidak ada yang menjelaskan atau mengatur kewenangan notaris menerbitkan covernote. Akan tetapi dalam praktiknya, notaris dapat menerbitkan covernote sehingga praktik hukum notaris tersebut menciptakan wilayah abu-abu (grey area) karena tidak ada kejelasan dasar hukum penerbitan covernote tersebut.

Ketiadaan aturan yang secara lugas dan spesifik yang menjadi pijakan penerbitan covernote oleh notaris sebenarnya dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang lain atau praktik kebiasaan notaris dalam penerbitan covernote. Perlu diketahui bahwa UUJN bukanlah satu-satunya regulasi yang memberi kewenangan terhadap notaris. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) jo. Pasal 15 Ayat (3) UUJN terdapat ruang bagi perundang-undangan lain di luar UUJN memberi keleluasaan atau kewenangan kepada notaris secara lebih luas dari sekedar yang diatur dalam UUJN.

Untuk memahami tentang dasar notaris berwenang menerbitkan covernote perlu penelaahan lebih lanjut dari aspek hukum yang lain. Hal ini dikarenakan dalam UUJN tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan tentang kewenangan tersebut. Oleh sebab itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan cara interpretasi atau penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UUJN terkait kewenangan notaris. Dalam beberapa literatur ilmu hukum, metode interpretasi teridentifikasi ada 9 (sembilan) jenis, salah satunya interpretasi gramatikal, yang menjadi objek kajian penulisan ini.

Setidaknya ditemukan 2 (dua) pasal yang saling berkaitan dan dapat dilakukan uji interpretasi yaitu Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang secara tekstual isi yang terkandung dari kedua pasal tersebut memiliki kesamaan maksud, yaitu "... Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya". Melalui pendekatan intepretasi gramatikal, maka akan dapat diketahui maksud yang terkandung dari isi kedua pasal tersebut. Interpretasi gramatikal (*grammatical interpretation*) adalah penafsiran yang semata-mata pada kata itu sendiri, atau metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan menguraikan makna kata-kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah tata bahasa.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) jo. Pasal 15 Ayat (3) UUJN memuat norma terkait dengan kewenangan notaris tidak hanya diatur dalam UUJN saja. Norma tersebut membuka peluang yang lebih luas terhadap kewenangan notaris jika ada undang-undang yang lain mengaturnya. Sejak UUJN yang baru disahkan pada tahun 2014, praktek penerbitan covernote memang telah menjadi bahasan umum di dalam ruang akademik maupun internal profesi notaris mengingat ketiadaan pijakan praktik hukum tersebut. Beberapa pertanyaan pun mencuat dalam kajian akademis yang membahas tentang kedudukan covernote dan implikasinya bagi notaris.

Setelah lima tahun berjalan sejak tahun 2014 disahkannya UUJN yang baru, pada tahun 2019 pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar hukum notaris menerbitkan covernote akhirnya terjawab sudah. Melalui Peraturan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehatian-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum (PJOK Nomor 11/POJK.03/2019), dalam Lampiran III peraturan tersebut ditegaskan dalam huruf d angka 2 bahwa "dalam Pelaksanaan Akad Kredit, Bank menetapkan prosedur baku paling sedikit untuk memastikan terdapatnya surat keterangan resmi (covernote) dari notaris yang menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam proses administrasi di instansi pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada Bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan."

Intrepretasi gramatikal pada kalimat "Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya" dapat diterjemahkan bahwa UUJN sebagai induk yang mengatur kewenangan notaris hanya mengatur secara garis besarnya saja, meskipun terdapat aturan penjelas atau aturan pelaksana, namun terkait dengan penebitan covernote memang tidak diatur sedikitpun.

Dalam ketentuan penjelas Pasal 15 Ayat (3) UUJN "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain" sebatas hanya melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik atau cyber notary, membuat ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Oleh karena itu, mau tidak mau sebagai konsekuensi logisnya terdapat peraturan lain yang mengatur norma baru yang memberi kewenangan bagi notaris untuk melakukan praktik hukum penerbitan covernote. Dengan meminjam istilah yang diperkenalkan Habib Adjie, kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 15 Ayat (3) UUJN sebagai kewenangan yang ditentukan kemudian, berupa Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mensyaratkan adanya covrnote dari notaris dalam setiap perjanjian kredit perbankan. POJK merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan mengikat bagi semua pelaku usaha jasa keuangan. Peraturan ini berisi regulasi yang bertujuan untuk memastikan proses bisnis dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan transparan.

Dengan demikian, PJOK Nomor 11/POJK.03/2019 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan karena dibuat oleh lembaga/institusi atau pejabat negara yang berwenang. Dengan adanya PJOK Nomor 11/POJK.03/2019 tersebut, telah menambah bobot atau tambahan "kewenangan" bagi notaris perihal penerbitan surat keterangan atau covernote untuk keperluan perjanjian kredit perbankan sebagai praktik hukum yang legal. Sehingga, kedepannya tidak ada pertentangan kembali terkait dasar hukum kewenangan notaris dalam penerbitan covernote karena melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh OJK tersebut telah menjawab persoalan hukum yang selama ini disebut grey area.

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Penerbitan Covernote yang Klausulnya Tidak Sesuai Dengan Fakta Sebenarnya

Berdasarkan interpretasi Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (3) UUJN serta keberadaan PJOK

Nomor 11/POJK.03/2019 telah memperjelas kewenangan notaris dalam penerbitan covernote yang sebelumnya berada wilayah grey area. Penerbitan covernote memang bukan menjadi kewenangan notaris jika merujuk Pasal 15 UUJN, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam praktik perjanjian kredit perbankan sehingga kebiasaan itu boleh dilakukan sebatas isi covernote tersebut tidak melampaui batas kewenangannya.

Dalam perjanjian kredit perbankan, penerbitan covernote atas permintaan pihak bank merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh para notaris. Isi yang terkandung dalam covernote berupa pernyataan atau keterangan yang menyatakan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta-akta tertentu telah dilakukan di hadapan notaris.

Mengingat dalam praktik penerbitan covernote boleh dilakukan oleh notaris, maka dapat dianalogikan dalam proses pembuatannya pun sudah selayaknya harus menerapkan prinsip kesaksamaan. Wajib bagi notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya bertindak secara saksama yaitu penuh dengan ketelitian dan kecermatan dalam penerbitan covernote. Saksama berada di deretan ketiga setelah notaris bersikap amanah dan jujur. Ketelitian dan kecermatan menjadi prioritas utama dalam setiap penerbitan akta atau surat keterangan (covernote) karena hal ini penting untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Implementasi prinsip kehati-hatian dan kecermatan dapat dilakukan dengan jalan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak bank jika menemui kendala atau persoalan dalam menyelesaikan akta-akta yang tercantum dalam covernote. Menurut Surach Winarni, notaris harus bertindak penuh kehati-hatian dalam penerbitan covernote karena problematika yang sering terjadi terkait penerbitan covernote salah satunya ketidaksesuaian dengan order bank, tidak ada perkiraan waktu penyelesaian, adanya kesalahan typo pada covernote, pihak bank tidak melakukan koreksi isi covernote, notaris tidak menyelesaikan pekerjaannya atau sengaja/beritikad buruk atau tidak baik, waktu penyelesaian telah melewati batas yang diperjanjikan serta terjadinya penerbitan addendum covernote oleh notaris.

Bentuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penerbitan covernote tersebut disebabkan karena pengabaian dari prinsip kehati-hatian notaris. Sehingga tidak heran jika di kemudian hari covernote tersebut dipermasalahkan pihak bank karena dinilai sebagai penyebab bank kehilangan agunan kredit karena akibat covernote yang bermasalah yang isi/klausulnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang telah dijelaskan di awal.

Kasus Notaris GH dalam perkara Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 telah menerbitkan covernote yang isi/klausulnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Para debitur tidak mempunyai usaha perdagangan, SIUP, TDP, Nota penjualan, mutasi rekening koran, surat agunan bagi debitur yang tidak memiliki ataupun agunannya kurang dari nilai kredit serta tidak membacakan isi Surat Perjanjian Kredit tersebut kepada para debitur serta menerbitkan Covernote yang ternyata sampai saat ini tidak bisa diterbitkan sertifikatnya dan tidak melakukan pemeriksaan SPPPFAT yang ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Milik yang sudah terbit untuk dijadikan sebagai agunan Kredit Modal Kerja (KMK).

Melihat fakta bahwa Notaris GH dalam penerbitan covernote ternyata sampai saat ini tidak bisa diterbitkan sertifikatnya, maka konsekuensi hukum bagai bentuk pertanggungjawaban hukumnya dapat dituntut secara perdata. Pihak bank BRI dapat menggugat notaris GH ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasinya atau dituntut sebagai perbuatan melawan hukum karena isi covernote tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, bentuk pertanggung jawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat dari ketidakbenaran penerbitan covernote yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, adalah pertanggung jawaban secara perdata karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Sementara untuk pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut kepada notaris jika ditemukan bukti tindakan hukum dari Notaris GH yang secara sengaja dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris bersama debitor bahwa covernote yang diterbitkan tersebut dimaksudkan untuk melakukan, turut serta melakukan, atau membantu melakukan kebohongan atau memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan bank. Dalam perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 terbukti bersalah telah merugikan keuangan negara sehingga notaris yang bersangkutan turut terseret dalam kasus tindak pidana korupsi selaku turut serta.

Selain itu, apabila melihat tiadanya pasal dalam UUJN yang memberi penjelasan penerbitan covernote sebagai kewenangan notaris, maka implikasi hukum dari penerbitan covernote tersebut tidak mempunyai daya kekuatan sebagai akta otentik, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang utuh, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ke arah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan, dan sepenuhnya tergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, Covernote tidak diatur dalam UUJN, maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana.

KESIMPULAN

Praktik hukum penerbitan covernote oleh notaris sebelum berlukanya PJOK Nomor 11/POJK.03/2019 menjadi wilayah grey area karena tidak adanya landasan praktik hukum tersebut. Berdasakan metode interpretasi Pasal 13 Ayat (1) UUJN, melalui PJOK Nomor 11/POJK.03/ 2019 telah memberi dasar hukum kewenangan notaris dalam penerbitan covernote dalam praktik perjanjian kredit perbankan.

Bentuk pertanggungjawaban notaris yang menerbitkan covernote yang isi/klausulnya tidak sesuai dengan sebenarnya seperti tidak bisa diterbitkan sertipikat, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dengan tuntutan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasinya atau dituntut sebagai perbuatan melawan hukum karena isi/klausulnya covernote tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sementara pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut jika perbuatannya terbukti mekakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 terbukti bersalah telah merugikan keuangan negara sehingga notaris yang bersangkutan turut terseret dalam kasus tindak pidana korupsi selaku turut serta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- Adjie, Habib, Dharsana, I Made Pria & Hafidh, Muhammad, (Editor), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020).
- Kosasih, J. Ibrahim & Haykal, H., *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
- Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Sesung, Rusdiyanto, Fayakundia P Sufi, Roosalina Kartini, Jeffry Tanugraha. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Cetakan ke-1. (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2017).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Erlangga, 1982).

Jurnal

- Hidayat, Iman, “Peranan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Kredit Tanpa Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Menurut UUHT “, *Jurnal Legalitas*, Edisi Desember 2019 Volume XI Nomor 2.
- Lestari, Ratna Ani & Santoso S. Agus, “Pelayanan Publik Dalam Good Governance”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol.2 No.1 Tahun 2022.
- Malini, Widijowati, Dijan & Martanti, Yurisa, “Kepastian Hukum Isi Surat Keterangan (Covernote) Terhadap Objek Yang Diproses Berdasarkan Akta yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 2 No. 2 Februari 2023.
- Nurhan, Cinta Annata, dkk., “Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum”, *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.9 Tahun 2024.
- Nurjaya, I Made Ari, Sumardhika, I Nyoman, & Widiati, Ida Ayu Putu, “Kewenangan Notaris Terhadap

Pembuatan Covernote”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2, Oktober 2023. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2535.421-425>.

Ridlwani, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwach-terstaat”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Sambe N.N, “Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut UU Perbankan”, Jurnal Lex Crimen, Volume 5 Nomor 4, April-Juni 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).

Susanti, Diah Imaningrum, Penafsiran Hukum: Teori dan Metode, Cetakan pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehatian-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.

Artikel

Lubis, Ikhsan. “Perlindungan Hukum Notaris dan Tantangannya: Penerbitan Covernote Dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.5710K/Pidsus/ 2023)”, Artikel, dalam <https://domainhukum.com/2024/11/06/penerbitan-covernote-dalam-sistem-hukum-indonesia>, diakses 12 Desember 2024.

Sugarda, Paripurna P., “Seminar INI: Hindari Masalah Hukum Covernote Wajib Tuntas”, Artikel, <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242477501/seminar-ini-hindari-masalah-hukum-covernote-wajib-tuntas>, diakses 12 Desember 2024.

Winarni, Surach, “Seminar INI: Hindari Masalah Hukum Covernote Wajib Tuntas”, Artikel, <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242477501/seminar-ini-hindari-masalah-hukum-covernote-wajib-tuntas>, diakses 12 Desember 2024.